



Kolonialisme Belanda di Wilayah Kecamatan Parlilitan dan Dampaknya terhadap Sosial-Budaya Masyarakat, 1877-1907

Herrio Tekdi Nainggolan^{1*}

¹Universitas Musamus, Indonesia

*rionainggolan@unmus.ac.id

Dikirim: 21-05-2025; Direvisi: 01-11-2025; Diterima: 01-11-2025; Diterbitkan: 13-11-2025

Abstrak: Tulisan ini menganalisa dan mengkaji perlakuan kolonialisme Belanda Tahun 1877-1807 di wilayah Kecamatan Parlilitan dan dampaknya terhadap sosial-budaya masyarakat. Sejarah mencatat peristiwa penjajahan Belanda di Tanah Batak, khususnya di daerah-daerah Kecamatan Parlilitan, selain sebagai tindakan-tindakan eksploratif juga merupakan aksi kejahatan terhadap kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menemukan bahwa kolonialisme Belanda melakukan tindakan-tindakan eksploratif dan pengancaman yang membawa ketakutan bagi penduduk. Tindakan itu, seperti pengancaman, kerja paksa (rodi), serta pembakaran pondok-pondok sawah penduduk. Masyarakat tidak berani melakukan perlawanan secara langsung, karena dari segi kekuatan fisik, kaum penjajah lebih kuat dan lebih siap serta diperlengkapi dengan persenjataan. Reaksi masyarakat sebagai tindakan perlawanan dilakukan dengan bersembunyi ke hutan dan sebagian bermigrasi ke daerah lain yang dirasa lebih aman. Dampaknya terhadap sosial-budaya masyarakat adalah penduduk mengkonstruksi dirinya sebagai kaum inferior, melemahnya fungsi dan otoritas hukum adat, berubahnya cara kerja masyarakat serta terbuka akses ke daerah lain akibat pembukaan jalan.

Kata Kunci: kolonialisme, sosial-budaya, wilayah parlilitan

Abstract: This paper analyzes the Dutch colonial presence in the Parlilitan District between 1877 and 1907, examining its impact on the socio-cultural dynamics of the local community. Historical records indicate that Dutch colonialism in the Batak region—particularly in Parlilitan—was not only exploitative but also constituted a form of systemic violence and a violation of human rights. Employing qualitative research methods, including interviews and literature review, this study reveals that the Dutch regime engaged in coercive and oppressive practices that instilled fear among the local population. These included threats, forced labor (rodi), and the destruction of community assets such as rice field huts. Direct resistance was rare, as the colonial forces possessed superior weaponry and physical strength. Instead, the local population resorted to passive forms of resistance, such as fleeing into forests or migrating to safer regions. The colonial period significantly altered the community's socio-cultural fabric, resulting in a collective sense of inferiority, the erosion of customary legal authority, transformations in labor patterns, and increased mobility due to the construction of transportation infrastructure.

Keywords: colonialism; socio-cultural; parlilitan region



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Wilayah Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, merupakan daerah yang cukup penting pada masa penjajahan Belanda. Dikatakan penting karena di wilayah inilah letak desa *Si Onom Hudon*, di mana fakta historis mencatat daerah ini dalam waktu yang cukup lama diduduki oleh kolonial Belanda yaitu mulai awal tahun 1900-an. Selain itu, di wilayah inilah lokasi wafatnya *Si Singamangaraja XII* pada tahun 1907 (Sidjabat, 1982).

Penjajahan Belanda di wilayah Kecamatan Parlilitan tentu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Kekuasaan dan pengaruh kolonialisme mengharuskan sistem sosio-kultural yang tradisional digeser oleh sistem kolonial. Sebagai contoh yang nyata, kekuasaan pemerintahan Belanda di Tapanuli Utara (pada masa Kolonial, wilayah kecamatan Parlilitan sekarang ini masuk ke wilayah keresidenan ini), masuk setelah berakhirnya perlawanan Raja Sisingamangaraja XII pada tahun 1907 (Bangun, 1988). Hal ini tentu semakin mendukung usaha Belanda untuk memperluas pengaruh dan kekuasaanya di Tanah Batak secara masif. Akibatnya, menambah persoalan bagi penduduk yang kian hari semakin kehilangan pegangan untuk menghadapi praktik-praktek kolonialisme yang tak terhindarkan (Simanjuntak, 2006).

Pengaruh kolonialisme di tanah Batak merambah ke hampir semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek pendidikan, keagamaan dan sosial-budaya (Azhari et al., 2024; Natalia & Aditya, 2019; Schumann, 2017). Pada masa sebelum penjajahan, suku Batak Toba sebagai masyarakat adat, dalam aspek budaya dan kekerabatan sangat kuat dan mengikat. Sistem norma dan nilai yang mereka hidupi berasal dan bersumber dari adat istiadat mereka. Bagi orang Batak Toba, seperti halnya bagi suku bangsa yang lain, adat bukan hanya sekedar kebiasaan atau tata tertib sosial tetapi sesuatu yang mencakup seluruh dimensi kehidupan: jasmani dan rohani, masa kini dan masa mendatang, hubungan dengan sesama maupun hubungan dengan “Sang Pencipta” (Aritonang, 1988). Adat bagi masyarakat primitif meliputi tata tertib sosial sebagai persekutuan hukum, persekutuan produksi dan persekutuan kepercayaan. Itu berarti meskipun saat itu orang Batak Toba menganut *animisme* dan *paganisme*, tetapi agama mereka sebagaimana agama yang kita pahami hari ini pada saat itu terkandung dalam adat.

Menanggapi maksud kedatangan Belanda di Tanah Batak, Sidjabat menegaskan data-data pihak Belanda mengatakan, alasan Belanda datang ke Tanah Batak adalah untuk berdagang, dan itu sangat berbeda dengan maksud kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis yang menjajah. Itu berarti, misi penginjilan tidak ada hubungannya dengan kedatangan Belanda. Sidjabat menambahkan, pihak Belanda mengklaim orang Batak tampaknya lebih damai dalam administrasi Belanda dari pada di bawah pemerintahan raja-raja Batak yang sering berkelahi (Sidjabat, 1982). Hal tersebut sampai pada hari ini pada umumnya diterima oleh banyak pihak, khususnya masyarakat Batak Toba Kristen yang merasa bahwa kedatangan Belanda berdampak pada kemajuan dan membawa peradaban yang sangat berarti bagi orang Batak. Pendudukan Belanda telah mengubah paradigma berpikir dan budaya kerja masyarakatnya dari yang primitif menjadi ke arah yang lebih maju dan berada lebih tinggi sehingga pemikiran orang Batak Toba menjadi lebih progresif (Tanjung, 2024).

Pengakuan dan klaim yang demikian secara umum diterima oleh Masyarakat Batak Toba, tentu bertolak belakang dengan konteks pengalaman penduduk Kecamatan Parlilitan sebagai kaum yang terjajah. Selain itu, beban sejarah atas kengerian kolonialisme Belanda membuktikan intimidasi dan perlakuan yang tidak manusiawi. Berdasarkan penuturan Situmorang (Veteran yang masih hidup saat penulis melakukan wawancara langsung) mengenai pengalaman ril yang dialami masyarakat Kecamatan Parlilitan saat itu, bahwa perlakuan pihak kolonial yang menindas penduduk telah menimbulkan ketakutan bahkan sikap perlawanan terhadap kaum penjajah. Selain menindas, mereka juga memperlakukan penduduk setempat

dengan semena-mena sesuai keinginan dan tujuan penjajah. Masyarakat dipaksa bekerja keras untuk membangun jalan tanpa mendapatkan upah. Pihak kolonial berusaha memanfaatkan penduduk untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan keadaan si pekerja bahkan mengabaikan kesehatan dan keselamatan jiwanya. Dengan kata lain, pendudukan Belanda menjadi eksploratif dalam pengalaman masyarakat. Dalam hal ini kaum laki-laki dewasalah yang menjadi sasaran. Masyarakat kampung yang masih primitif di mana sebelumnya biasa hidup santai, aman dan tanpa gangguan dengan bekerja bertani dan berburu, dengan kedatangan penjajah, situasi yang demikian tiba-tiba berubah karena dipaksa kerja berat dan keras disertai dengan ancaman oleh para penjajah. Bagi penduduk, perlakuan ini semacam gangguan dan ancaman yang membahayakan sehingga menimbulkan reaksi dalam berbagai bentuk perlawanannya dari masyarakat.

Melalui pendekatan sejarah, penelitian ini membantu menemukan peristiwa-peristiwa dan praktik-praktik kolonialisme di daerah Sumatera Utara khususnya di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Catatan sejarah seputar kolonialisme di Tanah Batak telah banyak melaporkannya. Penjajahan mendapat perlakuan rakyat Sumatera Utara (Eva & Pandiangan, 2019) dan pemberlakuan sistem kerja paksa dilakukan oleh Belanda dan Jepang di tanah (Situmorang, 2013; Siregar & Sormin, 2021). Tulisan lain menjelaskan hubungan kolonialisme dengan badan zending yang saling menguntungkan (Uli Kozok, 2010) serta mengkaji tentang kolonialisme dan identitas etnis Batak untuk mengidentifikasi kesadaran menjadi bagian kelompok yang lebih luas daripada kelompok kekeluargaan (Perret, 2010).

Studi kolonialisme Belanda di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para sejarawan dan ilmuwan sosial. Beragam penelitian menyoroti kebijakan ekonomi, kerja paksa (*rodi*), sistem tanam paksa, hingga pembangunan infrastruktur dan transformasi sosial di berbagai daerah (Adi & Triwardani, 2025; Prameswari et al., 2024; Setyoko & Nugroho, 2025; Suwignyo, 2021). Namun, sebagian besar penelitian tersebut berhenti pada deskripsi mengenai kebijakan kolonial dan dampaknya selama masa penjajahan, tanpa menelusuri secara mendalam bagaimana warisan kolonial (*colonial legacy*) itu terus berpengaruh pada struktur sosial, budaya, dan institusi masyarakat lokal setelah periode kolonial berakhir.

Sejumlah studi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Raden Bima Adi dan Reny Triwardani (2025) mengenai warisan kolonial dalam birokrasi Indonesia, serta kajian oleh Haryo Setyoko dan Arif Nugroho (2025) tentang struktur pemerintahan lokal pasca-kolonial, menunjukkan bahwa sistem kolonial membentuk pola hubungan kekuasaan dan struktur administrasi yang bertahan lama. Demikian pula, Suwignyo (2021) menegaskan bahwa sistem pendidikan pasca-kemerdekaan tetap dipengaruhi oleh paradigma kolonial, sedangkan Harahap et al., (2025) menelusuri keberlanjutan pengaruh bahasa Belanda dalam kosa kata dan sistem pengetahuan di Indonesia. Penelitian lain dilakukan oleh Rika Febriani dan Nurberlian yang menyoroti bagaimana agama adat (*indigenous religion*) menghadapi kondisi modernitas dan warisan kolonialisme (Febriani & Nurberlian, 2024). Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa kolonialisme tidak hanya menghasilkan dampak temporer, melainkan meninggalkan jejak struktural dan kultural yang terus hidup dalam masyarakat.

Namun demikian, dalam konteks lokal, khususnya di wilayah Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan penelitian mengenai kesinambungan dan warisan kolonial Belanda belum pernah dilakukan. Sebagian besar studi lokal hanya berfokus pada fase kolonial dan menggambarkan dampak langsung seperti kerja paksa, pembakaran huta, dan penyesuaian adat. Belum ada kajian yang secara sistematis menelusuri bagaimana praktik kolonial itu membentuk pola sosial, relasi kekuasaan adat, pola kerja, dan identitas kolektif masyarakat hingga periode pasca-kemerdekaan. Padahal, warisan kolonial dapat tetap hadir melalui

infrastruktur jalan yang masih digunakan, nilai kerja yang diwariskan, maupun relasi sosial yang merefleksikan hierarki kolonial masa lalu.

Kesenjangan penelitian ini penting untuk diisi karena memahami kolonialisme tanpa melihat dampak jangka panjangnya akan menghasilkan narasi yang parsial. Dengan menelusuri kesinambungan antara masa kolonial dan pasca-kolonial, penelitian dapat mengungkap bagaimana struktur kolonial di Parlilitan membentuk dinamika sosial-budaya masyarakat hingga kini, baik dalam bentuk identitas sosial kolektif, perubahan adat istiadat, maupun persepsi terhadap kekuasaan dan pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan fokus pada warisan kolonial sebagai faktor pembentuk kesinambungan sosial-budaya masyarakat Parlilitan dari masa kolonial hingga masa modern.

Urgensi dari penelitian ini akan mengungkapkan dan menjelaskan bagaimana perlakuan dan bentuk-bentuk tindakan kolonialisme Belanda bagi masyarakat di Kecamatan Parlilitan serta dampaknya terhadap sosial-budaya masyarakat hingga sekarang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang kolonialisme di wilayah Kecamatan Parlilitan dan dampaknya terhadap sosial-budaya masyarakat serta bagaimana pengalaman kolonialisme Belanda menjadi pembentuk kesinambungan sosial-budaya masyarakat Kecamatan Parlilitan dari masa kolonial hingga sekarang.

Dalam penelitian ini, untuk mengkaji dan menganalisis masalah di atas, maka teori dan kritik *orientalisme* yang dikembangkan oleh Edward Said akan dijadikan sebagai rujukan utama (Said, 2016). Said melihat sikap para orientalis terhadap orang-orang Timur dengan menampilkannya sebagai mahluk yang mudah dikecoh, “tak mempunyai energi dan tidak berinisiatif,” suka menjilat, berpura-pura, licik dan lemah. Orang-orang Timur tidak bisa berjalan di jalan raya atau trotoar (otak mereka yang kacau tak mampu memahami apa yang dapat dipahami dengan cepat oleh otak Eropa yang cerdas bahwa jalan raya dan trotoar dibuat untuk berjalan kaki). Orang-orang Timur adalah pembohong-pembohong, karatan, mereka malas dan “mencurigakan” dan dalam segala hal bertentangan dengan kejernihan, kelurusian dan kemuliaan sebagaimana watak ras Eropa (Said, 2016).

Pola-pola yang dikembangkan oleh kaum orientalis yang kembali terbentang pada abad pertengahan datang untuk membenarkan kolonialisme, penguasaan tanah dan pencurian sumber daya, perbudakan, serta agresi imperialis atas nama peradaban dan kemajuan. Para orientalis Eropa memiliki pemahaman yang telah terkonstruksi yang memposisikan Timur sebagai kaum yang inferior dalam artian di bawah Barat. Hal tersebut kemudian dijadikan sebagai alasan untuk mendominasi dan menjajah kaum yang dianggap lemah dalam hal ini adalah Timur. Sedangkan para penjajah dalam mendefinisikan dirinya unggul dan mencitrakan dirinya superior, dan sebaliknya orang-orang yang berada di belahan dunia lain dianggap sebagai inferior. Hal inilah yang menginspirasi serta memberi ruang bagi penjajah untuk menguasai dan mengatur masyarakat yang dijajah sesuai dengan kemauan dan tujuan mereka.

Teori ini menurut penulis cocok dan sesuai untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Penulis melihat sikap para penjajah dalam memahami dan memperlakukan penduduk dan masyarakat yang mendiami wilayah kecamatan Parlilitan, dengan praktik-praktik kolonialisme yang terjadi dimotivasi oleh pemahaman orientalisme. Situasi dan konteks penjajahan di wilayah kecamatan Parlilitan yang terjadi pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, selalu menempatkan penduduk sebagai komoditas yang potensial untuk dieksplorasi, baik tenaga masyarakat dan hasil kekayaan alam untuk kepentingan penjajah.

Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013). Maka

dalam tulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Jenis dan metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk memperoleh data yang mendalam berdasarkan pemahaman-pemahaman informan (Creswell, 2010). Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber literatur yang memuat informasi tentang tema penelitian dan wawancara mendalam kepada informan kunci.

Penelitian ini dilakukan di tiga desa kecamatan Parlilitan, seperti *Huta Sijungkang* desa Baringin, desa *Si Onom Hudon Timur* dan desa *Si Onom Hudon Tonga*. Desa tersebut di atas dijadikan sebagai lokasi penelitian karena daerah-daerah tersebut diketahui sebagai wilayah yang menjadi tempat terjadinya penjajahan Belanda. Unit amatan dalam penelitian ini adalah masyarakat kecamatan Parlilitan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah seorang Veteran di daerah desa Baringin yang hidup pada masa-masa penjajahan dan masih mengingat dengan jelas masa-masa penjajahan Belanda yang ia alami. Selain itu sebagai informan pendukung adalah seorang kepala kampung di desa *Si Onom Hudon Tonga* yang mendengar langsung dari orang tuanya tentang cerita-cerita pengalaman masyarakat di masa penjajahan Belanda.

Maka teknik pengambilan data dilakukan *pertama*, wawancara. Dalam wawancara, penulis melakukannya secara *face-to face*. Wawancara seperti ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open-ended*) yang dirancang untuk memunculkan pemahaman dan ingatan informan (Creswell, 2010). Data yang diperoleh diuraikan dan dideskripsikan berdasarkan pernyataan informan dan kemudian dianalisis secara teliti dan mendalam (Usman & Akbar, 2008). *Kedua*, studi pustaka. Pada langkah kedua ini, penulis melakukan studi pustaka guna memperoleh landasan teori melalui buku, literatur atau laporan peneitian yang berkaitan dengan topik penelitian. Setelah itu, langkah *ketiga*, adalah melakukan analisis dan interpretasi data. Dalam hal ini, berkaitan dengan studi sejarah, ada dua metode yang digunakan yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, sedangkan sintesis berarti menyatukan. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori, kemudian disusunlah fakta itu dalam suatu interpretasi yang menyeluruh (Abdurrahman, 2007). Dari ketiga langkah tersebut, penulis melakukan penarikan kesimpulan dari hasil analisis dan interpretasi data. Dengan demikian, kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

Wilayah Kecamatan Parlilitan dalam hal ini sebagai lokasi penelitian, khususnya desa *Si Onom Hudon* dan desa *Baringin*, secara historis merupakan daerah yang cukup penting pada masa penjajahan Belanda. Dapat dikatakan demikian sebab, di wilayah ini Si Singamangaraja XII pernah tinggal dalam kurung waktu yang lama dan putrinya yang bernama Lopian lahir di *Si Onom Hudon* dan *meninggal di wilayah ini*. Bahkan daerah ini merupakan ujung tombak program militer Si Singamangaraja XII dan sekaligus tempat peristiwa kewafatannya (Sidjabat, 1982). Perang melawan penjajahan Belanda yang dipimpin oleh Si Singamangaraja XII terjadi pada tahun 1877-1907. Maka untuk mengetahui tahun penting peristiwa penjajahan di wilayah kecamatan Parlilitan dapat mengacu pada tahun tersebut. Perang Toba pertama terjadi pada tahun 1878, dengan demikian penjajahan Belanda di wilayah Sumatera Utara terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang, yaitu dari tahun 1880-an sampai tahun 1907.

Hasil Penelitian

Tindakan-tindakan Kolonialisme di Wilayah Kecamatan Parlilitan

Menurut penuturan Tumanggor, penjajahan yang dilancarkan oleh pihak Belanda terhadap penduduk Kecamatan Parlilitan pada masa itu menimbulkan ketakutan yang cukup mendalam. Orang Belanda yang memiliki tubuh besar dan tinggi menjadi momok yang

menakutkan bagi penduduk setempat. Pada masa penyebutan bagi orang Belanda selaku penjajah disebut dengan *Si Bontar Mata*. Arti kata *Si Bontar Mata* secara harafiah adalah orang/manusia Eropa yang bermata putih. Secara umum orang Batak masa itu mengasosiasikan istilah ini sebagai orang luar yang sama sekali berbeda dengan masyarakat setempat. Ketika mendengar saja istilah “*Si Bontar Mata*”, siapa pun pasti mengalami ketakutan. Bahkan kalau ada yang mengatakan telah melihat *Si Bontar Mata*, maka semua warga akan berlarian menghindar dan bersembunyi. Hal ini terjadi karena ketika para penjajah datang ke perkampungan warga dengan jumlah yang cukup banyak, mereka selalu datang membawa senjata untuk menakut-nakuti. Mereka sengaja menunjukkan senjata pada setiap perjumpaan dengan warga dengan menenteng di bahu. Bahkan gerak langkah kaki mereka sepertinya agak dikencangkan seakan-akan menunjukkan kekuatan tenaga yang dimiliki. Sehingga saat itu dalam setiap perbincangan di perkampungan, masing-masing menceritakan ketakutan-demi ketakutan yang mereka alami. Hal ini kemudian membuat warga takut untuk keluar rumah.

Situmorang menceritakan, ancaman lain yang diterima adalah akan dibunuh. Siapapun yang berani melawan atau mencoba untuk menghalang-halangi pergerakan para penjajah, baik *Raja Huta* maupun rakyat biasa akan dibunuh. Istilah *Raja Huta* memiliki arti Raja Kampung, berperan sebagai pemimpin dan kepala adat untuk mengatur dan memimpin masyarakat. Dalam hal ini, *Raja Huta* selaku pemimpin cenderung tunduk kepada keinginan penjajah karena mengalami ketakutan. Karena *Raja Huta* sendiri telah tunduk, maka warga pun semakin takut. Akan tetapi menurut Situmorang, selama penjajahan terjadi di wilayah tersebut, tidak pernah ada korban jiwa yang dibunuh oleh kaum penjajah.

Sebagaimana yang terjadi di daerah jajahan yang lain, mengenai pemberlakuan sistem kerja paksa (Rodi) oleh Belanda, di wilayah Kecamatan Parlilitan hal yang sama juga terjadi. Pada masa penjajahan, mata pencarian masyarakat secara keseluruhan adalah bertani. Perkampungan yang mereka diami dikelilingi kawasan hutan yang lebat sehingga interaksi dengan orang luar relatif jarang. Sehingga dengan kedatangan Belanda, pembukaan jalan dirasa sangat mendesak. Walaupun wilayah ini merupakan daerah yang dekat dengan Barus, dan pada waktu itu Barus sudah cukup dikenal oleh penduduk setempat sehingga secara pasti penduduk sudah mengenal dan melakukan perdagangan, akan tetapi jalan yang ada sebagai penghubung kedua wilayah itu belum memadai untuk memperlancar perdagangan.

Jalan penghubung untuk menghubungkan suatu daerah dengan daerah yang lain sangat mendesak untuk dibangun. Pembukaan jalan yang memang cukup urgen, terjadi saat itu dikerjakan untuk memperlancar arus perdagangan dari Barus ke daerah-daerah yang lain. Kota Barus sebagai kota perdagangan menjadi pusat perekonomian saat itu bagi masyarakat. Namun karena keadaan jalan yang tidak mendukung, maka arus barang mengalami kendala dan keterlambatan untuk mendistribusikannya sampai ke Barus. Situasi yang demikian inilah yang mengharuskan supaya dibuka jalan untuk menghubungkan wilayah-wilayah di sekitaran daerah Barus, demi kelancaran pendistribusian barang-barang dagangan dan hasil hutan.

Kota Barus memang relatif dekat dengan wilayah Kecamatan Parlilitan, akan tetapi waktu itu hanya sedikit orang saja yang pernah pergi ke Barus. Mereka yang pergi ke Barus hanyalah kaum pria yang dianggap kuat dan sehat secara fisik, sebab jalan yang akan dilewati adalah kawasan hutan yang berbahaya dari serangan binatang buas dan medannya pun cukup berbahaya. Dalam melakukan perjalanan ke Barus untuk membawa hasil-hasil hutan, orang yang diutus pergi dengan berkelompok. Perjalanan yang mereka tempuh memakan waktu sekitar dua hari bahkan bisa sampai tiga hari. Hal ini dikarenakan medan atau keadaan jalan di hutan cukup ekstrim serta menguras tenaga.

Untuk pembangunan jalan yang baru ini, para penjajah berharap dapat dikerjakan dengan cepat sesuai dengan target waktu yang diinginkan. Dalam hal ini, kaum laki-laki dewasa yang

ada dalam masyarakat lokallah dijadikan sebagai pekerja, mereka dipaksa bekerja keras dengan pengawasan yang ketat. Kekerasan dan tekanan kerja pada masa kolonial Belanda tampak jelas dalam kesaksian Tumanggor. Tumanggor menuturkan:

“Molo niingot do namasa i, laho mambukka dalam na baru tu Barus dipaksa halak Bolanda do akka parkarejo i. Disonggahi do angka parkarejo i molo adong na gale-gale. Ditiop nasida ma linsing-linsing laho pabiar-biarhon, jala molo adong namangalo dilinsinghon mai i tu pamatang na, olo sipata ditunjanghon. Gabe mabiar ma nasida jala dang adong marmeam-meam ala naung mabiar. Jadi mansai ngeri do pambahenan di Bolanda tu angka parkerejo i”.

Artinya:

“Dalam ingatan saya, saat membuka jalan yang baru menuju ke Barus, pihak Belanda memberlakukan kerja Paksa kepada para pekerja. Mereka membentak para pekerja kalau melihat dalam seperti keadaan loyo. Sambil memegang cambuk (alat pemukul) untuk menakut-nakuti sehingga jika ada yang melawan maka akan dipukul ke badan si pekerja, bahkan tak jarang juga ditendang. Maka semua orang mengalami ketakutan dan tak ada keinginan untuk melawan. Jadi semua perlakuan pihak Belanda sangat mengerikan bagi para pekerja itu.

Kekejaman penjajah yang dialami para pekerja Rodi tidak hanya sampai di situ. Tumanggor menambahkan, para pekerja selain dipaksa bekerja berat juga tidak diberi upah atau digaji sama sekali. Mengenai makan dan minum juga tidak dipedulikan, sehingga tidak jarang mereka bekerja tanpa makan dan mengalami kelelahan bahkan sampai sakit. Hal ini sangat berdampak pada kelangsungan hidup keluarga, karena penghasilan keluarga menjadi tidak menentu. Kaum ibu menjadi tidak maksimal bekerja di ladang maupun di sawah karena mengalami kekawatiran dan ketakutan dan kadang hanya berdiam diri di rumah untuk menjaga anak-anak mereka. Tentu saja dengan pemberlakuan sistem kerja paksa, sangat berdampak pada stabilitas keluarga dan perekonomian masyarakat. Dengan adanya kerja paksa ini, para laki-laki yang berperan sebagai penopang perekonomian keluarga dipaksa bekerja membangun jalan tanpa digaji dan tidak bisa lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dari situasi yang demikian, dapat dibayangkan pada masa penjajahan Belanda sangat sulit untuk bertahan hidup. Situasi hidup yang sulit ini bukan saja ketidakpastian akan ketersediaan pangan dan bahan makanan, tetapi juga dibayang-bayangi ketakutan ancaman terhadap kematian.

Hal ini menunjukkan bahwa pada masa kolonial, kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap masyarakat lokal tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menanamkan ketakutan yang dalam. Praktik seperti ini sejalan dengan konsep "kerja paksa kolonial" atau *heerendiensten*, di mana rakyat pribumi dipaksa bekerja tanpa upah atau dengan tekanan yang tidak manusiawi. Kesaksian Tumanggor memperlihatkan betapa memori kolektif masyarakat menyimpan trauma kolonial secara turun-temurun. Deskripsi tentang membentak, memegang cambuk, dan menendang serta pemaksaan fisik merupakan bentuk dominasi kekuasaan kolonial yang berakar pada kekuatan koersif.

Aksi dan kekejaman pihak kolonial tidak sampai hanya di situ. Para penjajah juga melakukan aksi pembakaran rumah di perkampungan dan pondok-pondok di sawah maupun ladang warga. Hal ini dipicu oleh kemarahan penjajah karena "Raja Huta" dan penduduk setempat melakukan perlawanan terselubung untuk menentang penjajahan. Perlawanan terselubung tersebut, misalnya ketika pihak Belanda menyuruh *Raja Huta* untuk mengumpulkan dan mengatur serta mengawasi para pekerja, pada saat pihak yang ditugaskan sedang tidak di tempat, *Raja Huta* dan para pekerja ini malah memberontak dan tidak melakukan apa yang diperintahkan. Hal ini diketahui oleh kolonial karena hasil dari pekerjaan yang mereka kerjakan tidak sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

Cara lain yang dilakukan adalah ketika *Raja Huta* bersama para warga mengadakan semacam rapat di halaman perkampungan untuk membicarakan dan merumuskan tindakan-tindakan untuk menghadapi penjajahan. Pertemuan ini dilakukan oleh *Raja Huta* bersama dengan perwakilan tua-tua kampung pada malam hari secara tersembunyi untuk mengelabui para penjajah. Akan tetapi hal ini diketahui penjajah dan menyulut kemarahan mereka. Akibatnya, beberapa rumah warga dan pondok-pondok sawah dibakar oleh para penjajah. Kerugian yang dialami penduduk cukup besar dan peristiwa ini menambah ketakutan dan menimbulkan beban baru bagi kehidupan mereka.

Akhirnya mereka merasa dan menyadari bahwa martabat mereka sebagai manusia dalam komunitas kekeluargaan sedang terancam oleh keberadaan penjajah. *Raja Huta* sebagai pemimpin tidak lagi memiliki wibawa karena warga sedang mengalami ketakutan-ketakutan dan sesuatu yang lebih buruk bisa saja terjadi. Dengan situasi yang demikian, pihak kolonial semakin leluasa melancarkan aksi dan keinginannya untuk menguasai dan mengatur penduduk setempat. Sementara warga tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya tunduk terhadap perlakuan penjajah serta menerima kenyataan bahwa mereka sedang terancam dan dalam posisi bahaya.

Reaksi dan perlawanan Penduduk terhadap Kolonialisme

Secara nyata warga merasa dan mengalami kehidupan yang sangat terusik oleh kedatangan kaum penjajah. Maka warga bersembunyi ke hutan-hutan yang jauh dari pemukiman sebelumnya yang mereka tempati. Langkah ini menjadi pilihan yang tepat saat itu, mengingat keterbatasan untuk melawan kaum penjajah, dan jika melawan maka resikonya akan dibunuh. Bayang-bayang ketakutan dan intimidasi yang terus terjadi, mengharuskan sebagian warga memilih untuk bersembunyi di hutan. Masyarakat sadar bahwa hutan bukanlah tempat yang aman bagi mereka, bahkan nyawa menjadi taruhannya karena tentu serangan binatang buas sangat membahayakan. Mengenai hal ini Situmorang menceritakan:

“Ai so niboto be tu dia lao, alani biar mangida halak Bolanda. Di roha ni jolma i, na penting unang ma sampe dipamate Bolanda iba. Tu tombak na rahis pe ni suruk ma. Ai namasa i, angka tombak do sude huta on, jala muse sering do binege soara ni babiat dohot gompul. Alai molo di huta on pe iba tong do dibagasan biar. Mangula pe mabiar, di jabu pe mabiar. Alai anggo di rohani jolma i tumagon ma songoni daripada lomo-lomo ni Bolanda tu iba”.

Artinya:

“Warga mengalami kebingungan bagaimana cara menghindar, karena perasaan takut terhadap Belanda. Memasuki hutan yang jelas berbahaya pun menjadi pilihan. Karena memang pada saat itu, di sekitaran perkampungan ini semuanya masih hutan dan kalau kita ke hutan sering terdengar suara harimau dan beruang. Tetapi pertimbangannya, kalaupun tetap bertahan di kampung ini tetap saja dibayang-bayangi ketakutan. Keluar rumah pun untuk bekerja, masyarakat takut. Sehingga masyarakat berpikir cara demikian lebih baik daripada menerima perlakuan Belanda yang sewenang-wenang.

Pada masa penjajahan Belanda, untuk menghindari perbudakan dan kekejaman penjajah, banyak orang Batak melakukan migrasi. Data sejarah menemukan bahwa ketika kolonial Belanda berhasil menguasai hampir seluruh Tanah Batak, banyak masyarakat Batak Toba dijadikan sebagai budak dan pekerja Rodi. Hal ini membuat mereka mulai tidak nyaman di kampung halaman mereka dan mulai mencari daerah baru dengan cara bermigrasi agar terhindar dari kekuasaan pemerintahan Belanda (Eva & Pandiangan, 2019).

Pengalaman dan konteks masyarakat desa *Si Onom Hudon* menguatkan penelitian tersebut. Aksi perlawanan yang dilakukan warga, selain bersembunyi ke hutan di sekitaran perkampungan, sebagian dari mereka menghindari kolonialisasi dengan merantau atau bermigrasi

untuk beberapa waktu ke daerah lain. Kerasnya hidup dan kehidupan pada masa penjajahan Belanda mengharuskan mereka memilih untuk merantau. Saat maraknya terjadi kerja paksa, mereka bukan hanya terancam karena dipaksa menjadi mesin tenaga untuk bekerja, tetapi juga karena ancaman ekonomi bagi kelangsungan hidup keluarga. Mereka pergi dengan meninggalkan anak dan istri di kampung halaman dengan harapan mendapat penghasilan di daerah rantau.

Mereka bermigrasi dengan maksud untuk menghindari kerja paksa yang diberlakukan pihak kolonial untuk beberapa waktu. Tidak ada keinginan untuk berpindah secara menetap di daerah yang baru, sebab mereka merasa bahwa kampung halaman yang ditinggalkan adalah tanah warisan leluhur yang harus dijaga. Mereka pulang pada saat penjajah sedang tidak berada di kampung halaman atau ketika proyek pembangunan jalan sedang berhenti. Hal ini terjadi karena memang mereka menghindari penjajahan dan menolak untuk dijadikan budak dan pekerja Rodi. Alasan keamanan, kenyamanan dan ekonomi menjadi penyebab bagi sebagian masyarakat untuk memilih bermigrasi ke daerah lain yang aman dari penjajahan.

Akibat dari akumulasi perlakuan kolonial bagi masyarakat, maka memunculkan stigma *Si Bontar Mata* yang kejam. Etimologi *Si Bontar Mata* adalah istilah yang disematkan oleh orang Batak kepada orang Belanda atau orang Eropa. Secara harafiah, kata “Si Bontar Mata” memiliki arti si putih mata. Pada masa kolonial istilah ini juga dipakai kepada para misionaris Eropa, sehingga sangat populer di kalangan masyarakat Batak dan lebih berkonotasi negatif. Hal ini dapat dipahami sebab orang-orang Eropa selain dalam pengalaman penduduk sebagai penjajah yang kejam tetapi juga ras yang berbeda khususnya karena mata mereka yang putih dan berbadan besar (Matondang, 1995). Menurut pengamatan masyarakat Kecamatan Parlilitan, *Si Bontar Mata* merupakan orang yang asing, asing gerak-geriknya, bahasanya, warna kulitnya, dan asing tindakannya.

Dalam konteks pengalaman perjumpaan masyarakat Kecamatan Parlilitan dengan orang *Si Bontar Mata*, semua yang mereka temukan dalam diri kaum penjajah adalah hal-hal buruk dan destruktif terhadap kehidupan sosial. Kehadiran orang-orang *Si Bontar Mata* di wilayah mereka, benar-benar mengganggu dan mengancam kenyamanan dan tatanan sosial yang sudah mereka hidupi. Penduduk setempat merasa diperlakukan layaknya seperti bukan manusia dan hanya diperalat untuk kepentingan penjajah. Eksplorasi, intimidasi bahkan diancam akan dibunuh merupakan pengalaman nyata yang tak terhindarkan karena ketiadaan daya dan kekuatan untuk melawan. Pengalaman-pengalaman yang demikian membuat penduduk setempat menganggap bahwa *Si Bontar Mata* tidak saja menjajah tetapi juga sebagai kaum yang jahat. Anggapan yang demikian bukan tanpa alasan, sebab dalam pengalaman masyarakat, tindakan dan perlakuan pihak penjajah kepada penduduk setempat adalah kejahanatan (Said, 1995).

Kolonialisme Membawa Transisi

Pengaruh kolonialisme dalam masyarakat secara nyata terjadi karena pemberlakuan sistem kerja paksa merupakan perbudakan dan eksplorasi kemanusiaan yang sangat mengancam terhadap tatanan dan pola hidup penduduk. Hal demikian menjadi semacam citra manusia Barat oleh masyarakat, di mana sebelumnya masyarakat menjalani hidup keseharian dengan bekerja bertani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harapan supaya tersedia makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak begitu menginginkan pertambahan kekayaan yang menumpuk. Pola hidup ini merupakan semacam pandangan yang umum di masyarakat sehingga keinginan dan kebiasaan untuk bekerja dengan sangat keras menjadi sesuatu yang berbeda dari kebiasaan mereka. Sangat berbeda saat penjajahan terjadi, karena selain bekerja dengan tuntutan yang keras, pihak kolonial juga memasang target dan

pencapaian terhadap lamanya waktu dalam pengeraannya. Dengan begitu, masyarakat merasa bahwa menghidupi kehidupan seperti itu merupakan penyiksaan dan sulit untuk ditanggung mereka.

Mengenai prinsip hidup masyarakat setempat sekilas sepertinya sejalan dengan pandangan kaum orientalis dalam memahami dan mengkonstruksi orang-orang Timur dan dunia ketimuran. Akan tetapi hal ini berkaitan dengan orientasi dan nilai-nilai hidup masyarakat. Masyarakat dalam hal ini bukanlah kaum yang malas, lamban dan lemah sebagaimana yang dipersepsikan oleh kaum orientalis, sehingga harus diatur dan diawasi (Perry, 2013). Namun, perilaku dan tindakan hidup mereka sehari-hari ditentukan oleh prinsip dan orientasi hidup yang memang berbeda dengan prinsip manusia Barat seperti yang diterapkan oleh para penjajah. Bagi mereka, tujuan dan orientasi hidup berarti menjalani kehidupan dengan tenang dan saling berdampingan dalam komunitas kekeluargaan sebagaimana yang diamanatkan oleh adat.

Masyarakat Kecamatan Parlilitan sebagaimana masyarakat Batak Toba pada umumnya, hidup diatur oleh adat dan falsafah hidup *Dalihan na Tolu* untuk berelasi dengan orang lain. Hingga belakangan ini masyarakat kecamatan Parlilitan sangat kuat mempertahankan adat sehingga tidak berubah dan sulit tergradasi dari nilai-nilai kultural dan adat merupakan sebagai aspek yang fundamental tanpa menolak kemajuan dan perkembangan zaman. Tetapi pengaruh-pengaruh agama, nasionalisme dan perubahan peradaban sebagai bagian dari kolonialisme telah memaksa adat berubah agar sesuai dengan tuntutan zaman dan dapat terus berasistensi (Harianja & Sudrajat, 2021). Masyarakat mendapati nilai-nilai adat hidup terus, karena orang Batak termasuk masyarakat kecamatan Parlilitan hari ini mengharapkannya dan menyangka bahwa di sana terkandung ketaatan, kebiasaan-kebiasaan yang baik dan kepercayaan-kepercayaan lama yang memungkinkannya untuk tetap dijaga dan dihidupi.

Dalam kaitannya dengan perubahan-perubahan, Pedersen membagi adat Batak menjadi empat kategori. *Pertama*, ada adat yang membatasi kemajuan melalui pesta-pesta dan upacara-upacara yang diselenggarakan dengan cermat dan mahal. *Kedua*, ada adat yang berkaitan dengan pertanian, misalnya cara-cara menanam padi sampai memanen yang membuat proses produksi menjadi sangat lama tetapi juga memberi sumbangan pada kualitas produksi. *Ketiga*, ada adat yang mengatur aktivitas-aktivitas masyarakat. *Keempat*, ada acara adat dan perbuatan simbolis yang mempunyai nilai estetik dan nilai fungsional dalam masyarakat (Pedersen, 1975).

Apabila adat itu dirubah tanpa menghiraukan masyarakat yang sedang berubah maka ini juga akan merubah tujuan-tujuan dan nilai-nilai sosial sehingga berdampak luas pada sistem sosial dan status kedudukan-kedudukan dalam masyarakat (Gultom, 2010). Bila adat dimaksudkan tetap kuat dan tidak berubah di tengah-tengah perubahan sosial, maka tujuan dan nilai-nilai adat itu akan tinggal statis di tengah-tengah masyarakat yang sedang berubah. Jika perubahan sosial dan perubahan adat terjadi, maka proses untuk mendamaikan antara pihak-pihak yang berbeda kepentingan dan yang berbeda pandangan akan menyebabkan konflik sosial. Mereka yang sangat kuat untuk mempertahankan dan menyokong adat melawan pengaruh-pengaruh dari luar yang merusak, menekankan tradisi-tradisi para leluhur. Sementara pihak yang lain cenderung untuk merubah adat dengan mengatur tingkah laku sosialnya menurut sistem-sistem nilai yang alternatif dan baru.

Selain itu, beban ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat jajahan semakin menggunung ketika para penjajah membatasi ruang gerak masyarakat. Pembatasan ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, pembatasan secara langsung misalnya ketika kaum laki-laki yang seharusnya bekerja di ladang maupun di sawah milik keluarga, tetapi pihak kolonial mengharuskan mereka bekerja dan mengerjakan proyek pembukaan jalan baru maupun sarana irigasi air. Tidak hanya itu saja, mereka juga dilarang bekerja di lahan masing-masing selama masih ada pengeraan yang telah dibuat kolonial belum

selesai. Larangan ini berlangsung cukup lama dan mereka terus diawasi selama bekerja. Situasi seperti ini tentu saja mengurangi bahkan mengancam pendapatan keluarga, sehingga tidak jarang anggota keluarga mengalami kelaparan. Pihak kolonial memang sama sekali tidak mempedulikan keadaan dan penderitaan yang sedang dialami penduduk. Mereka diperlakukan oleh kaum kolonial seperti *the other* (manusia yang lain) dan tidak melihat sisi kemanusiaan masyarakat jajahan. Situasi sosial berubah sejak kekuasaan-kekuasaan kolonial datang ke Tanah Batak. Kolonialisme datang salah satunya dengan tujuan ekonomi yaitu untuk mencari dan mendapatkan laba yang sebesar-besarnya sehingga merugikan masyarakat (Castles, 2001; Sibagariang, 2018). Orientalisme sebagai pandangan yang melihat bahwa pergerakan ekonomi global sangat penting maka harus secara serius lebih ditingkatkan. Penduduk setempat mengalami ketakutan dan ketidakberdayaan untuk menolak perlakuan pihak kolonial dan sisi kelemahan inilah yang dimanfaatkan oleh pihak penjajah. Kolonialisme dengan leluasa mengeksplorasi penduduk setempat dan tidak memperhitungkan penghidupan yang layak bagi mereka. Sebagaimana kaum orientalis merasa bahwa manusia Barat, peradaban Barat dan nilai-nilai Barat sama sekali berbeda dengan manusia Timur dan peradabannya. Orientalisme melihat orang-orang Timur sebagai “manusia yang gagal dalam proses penciptaannya”. Dalam hal ini penduduk dijadikan sebagai objek eksplorasi, objek percobaan dan penelitian, yang diperlakukan menurut kemauan dan tujuan kolonialisme.

Akan tetapi proses dan cara-cara dalam bekerja yang diterapkan kolonialisme kian hari berpengaruh luas terhadap pemahaman masyarakat. Ada perubahan mentalitas dalam diri penduduk untuk lebih berinisiatif dan berinovasi dalam memulai sesuatu cara bekerja (Tamba et al., 2022). Hal ini merupakan perubahan cara hidup yang cukup revolusioner saat itu, mengingat bahkan pada masa tahun 1970-1980 an masyarakat Indonesia secara umum masih terhambat pembangunan manusianya karena mentalitas feudal dan hirearkhis (Koentjaraningrat, 1982). Dalam hal ini misalnya karena penduduk selama ini sangat tergantung pada alam dan mengandalkan cara-cara bertani yang tradisional, dengan kedatangan kolonialisme mereka mengenal prinsip bekerja yang lebih efisien. Pengetahuan lokal masyarakat dalam bertani yang diterapkan secara konvensional kemudian dipadukan dengan cara maupun prinsip yang diterapkan oleh kolonialisme, menghasilkan efektifitas kerja dan produktivitas hasil. Masyarakat setempat memperoleh pemahaman baru dalam bertani dan tentu hal ini membawa perubahan yang positif untuk meningkatkan penghasilan dari hasil bertani.

Dampak positif yang lain bagi aspek ekonomi adalah dengan adanya pembuatan dan pembangunan jalan, masyarakat sangat terbantu untuk menjual hasil-hasil hutan dan pertanian ke daerah-daerah yang lain. Arus transaksi dan perdagangan dengan daerah lain menjadi mudah sehingga secara keseluruhan wilayah kecamatan Parlilitan yang sebelumnya adalah perkampungan terisolir, menjadi wilayah yang dapat diakses khususnya untuk kegiatan ekonomi baik ke Dolok Sanggul maupun ke Barus. Selain itu, barang-barang dagangan dari daerah lain untuk kebutuhan masyarakat juga menjadi mudah didapatkan. Hingga hari ini, jalan penghubung dan jalan utama yang ada di daerah-daerah kecamatan Parlilitan adalah jalan yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam aspek ekonomi, kehadiran kolonialisme lebih mengarah pada dampak negatif pada masa penjajahan, sedangkan pada pascapenjajahan dampaknya cukup positif dan manfaatnya dirasakan hingga saat ini. Itu berarti bahwa intervensi kolonial terhadap penduduk membawa kemajuan karena mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan, khususnya aktivitas perekonomian.

Terjadinya Identifikasi Diri Maupun Kelompok

Perjumpaan dan pengalaman penduduk dengan kolonialisme secara langsung membuat mereka mengalami peristiwa traumatis. Sikap dan tindakan para penjajah yang melakukan keberingasan kepada penduduk setempat telah mengganggu tatanan hidup mereka. Masyarakat sebelumnya hidup dalam norma-norma yang menghidupi hukum adat dan nilai-nilai budaya secara turun temurun, oleh kehadiran dan perlakuan kolonial Belanda kemudian mengalami pergeseran (Tamba et al., 2022). Mereka terganggu dari kehidupan yang biasa tenang dan damai, dengan kedatangan penjajah dituntut harus hidup menurut ritme kolonialisme yang cepat dan ambisius. Pergeseran pola hidup itu lebih mengarah pada sistem bekerja, di mana sebelumnya tidak begitu menekankan pada hasil dan pencapaian, tetapi prinsip bekerja mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan. Prinsip yang demikian sesuai dengan tuntutan zaman saat itu yang masih primitif.

Keberhasilan kolonialisme untuk mengatur dan menguasai masyarakat juga mengubah tatanan hidup sosial penduduk. Kesadaran akan keterbatasan dan kelemahan muncul ketika berhadapan dengan para penjajah. Para penjajah ini merupakan manusia bertubuh besar dan tinggi dalam artian berbeda secara fisik yang suka menindas dan mengusik kehidupan kolektif masyarakat. Cara kolonialisme melihat dan memperlakukan mereka sebagai kaum yang mudah diperdaya, menguatkan penduduk untuk lebih berani menyikapi dan lebih mengenal diri. *Si Bontar Mata* sebagai “manusia yang lain” merupakan kaum yang berbeda dengan komunitas mereka, berbeda cara kerja, berbeda pada nilai dan sistem hidup, serta ada untuk mengacau dalam komunitas masyarakat. Mereka sebagai komunitas, menghadapi ancaman yang datang dari kaum penjajah yang berbeda dari komunitas mereka. Penduduk setempat mendapati diri sebagai kaum yang tidak berdaya untuk membela diri terhadap ancaman dari “manusia yang lain” (Habeahan et al., 2020). Dinamika posisi identitas ini berkaitan dengan masyarakat sebagai kaum terjajah dan perlakuan yang diterima dari pihak penguasa. Status dan derajat para penjajah menjadi berbeda serta lebih tinggi dari masyarakat jajahan. Citra yang demikian sengaja diciptakan oleh kolonialisme untuk menakut-nakuti dan menghilangkan kepercayaan diri mereka. Dengan demikian, kolonialisme semakin leluasa untuk menguasai dan mengatur penduduk sesuai dengan tujuan dan kemauan para penjajah.

Teori identitas sosial menjelaskan, di mana hubungan antar kelompok secara umum dan konflik sosial secara khusus memiliki tiga point utama. *Pertama*, orang termotivasi untuk mempertahankan konsep diri yang positif, *kedua*, konsep diri sebagian besar berasal dari identifikasi kelompok, dan *ketiga* orang membangun identitas sosial yang positif dengan membandingkan *kelompok dalam* dan *kelompok luar* mereka (Operario & Friske, 1999). Dengan demikian, teori identitas sosial mengasumsikan bahwa proses-proses perbandingan sosial internal mendorong konflik antar kelompok, meskipun tidak terdapat persaingan atau kompetisi secara eksplisit di antara kelompok. Sebagai penduduk dan kelompok yang terjajah, masyarakat menyadari tidak mungkin melakukan perlawanan secara langsung dan terbuka kepada penjajah, sebab dari segala aspek dan sumber daya mereka kalah.

Masyarakat Kecamatan Parlilitan pada masa itu tidak melakukan resistensi dalam bentuk perlawanan langsung terhadap kolonialisme sehingga tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Perlawanan lebih pada bentuk simbolik dan menghindari kontak langsung. Penduduk sadar bahwa mereka sudah dikuasai, diatur dan diperlakukan menurut kemauan dan tujuan kolonialisme. Maka dalam hal ini, tunduk, diam dan menghindar juga merupakan perlawanan untuk menghadapi penjajah yang kejam. Sikap yang demikian ini dilakukan karena memang kaum penjajah lebih kuat karena memiliki senjata dan lebih cepat pergerakannya sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perlawanan fisik.

Melalui identifikasi diri dan kelompok, muncul upaya-upaya untuk mempertahankan identitas diri yang positif dan memperbaiki citra identitas sosial masyarakat yang sedang

terpuruk baik dalam skala individual maupun skala kelompok. Identifikasi muncul secara personal maupun komunal, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perlawanan kepada para penjajah yang sudah menguasai mereka. Kesadaran diri sebagai kaum yang lemah inilah, dalam mempertahankan hidup serta menjaga harga diri, mengharuskan sebagian dari anggota masyarakat memilih bersembunyi di hutan-hutan dan bermigrasi ke daerah lain yang aman dari penjajahan.

Adat dan Sistem Kepemimpinan

Pada masyarakat Batak Toba, terdapat struktur sosial berdasarkan kesatuan-kesatuan yang disebut *Huta*. *Huta* merupakan penyebutan untuk perkampungan atau desa tradisional Batak Toba yang didiami oleh kelompok-kelompok clan maupun kelompok marga. Dalam masyarakat, tiap *Huta* merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri dalam pemerintahannya. *Huta* ini merupakan suatu kesatuan pemerintahan yang otonom dalam kedudukan hukumnya. Masyarakat yang mendiami suatu *Huta* diatur menurut aturan dan hukum adat yang berlaku salah satunya yang paling umum adalah *Dalihan Na Tolu*. Pemimpin mereka yang disebut dengan *Raja Huta* adalah seorang yang dianggap mempunyai kedudukan “magi”, yaitu memiliki wibawa dan kebijaksanaan khusus yang dalam konsep orang Batak Toba disebut *sahala* atau roh kebijaksanaan (Soejanto, 1991). Pemimpin biasanya memiliki karisma dan kelebihan-kelebihan dari anggota masyarakat lainnya. Pemimpin dalam hal ini *Raja Huta* dianggap juga sebagai orang yang berjasa dan berpengaruh di masyarakat.

Seorang *Raja Huta* membawahi sistem politik dan mengatur jalannya aturan dan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Setiap kampung atau *Huta* memiliki otonomi tersendiri akan tetapi masyarakatnya terikat seluruhnya oleh hukum dan aturan adat. Maka *Raja Huta* secara langsung dan praktis melakukan sistem aturan adat. Sebelum masa penjajahan Belanda, sistem yang demikian inilah yang berlaku di masyarakat Kecamatan Parlilitan. Kehidupan sosial budaya mereka sebagai masyarakat pedesaan yang belum banyak tersentuh oleh pengaruh dari luar merupakan kehidupan yang harmonis, tenang dan hidup dalam kolektivitas yang kuat tanpa adanya ancaman. Hal ini kemudian membuat pola dan sistem pemerintahan masyarakat berjalan menurut aturan adat dan tradisi.

Kedatangan kolonialisme kemudian mempengaruhi bahkan mengubah sistem yang demikian, karena sistem pemerintahan diintervensi bahkan diambil alih oleh pihak kolonial. Dalam sistem pemerintahan misalnya, *Raja Huta* yang cukup sentral dan menjadi tokoh penting sebagai panglima hukum untuk mengatur serta memimpin jalannya selain aturan adat juga pemimpin masyarakat adat, kini posisi dan fungsinya mengalami pergeseran (Hirosue, 1994). Wibawa dan otoritas (dalam konsep Batak Toba disebut *sahala*) seorang *Raja Huta* sebagai pemimpin di masyarakat menjadi berkurang bahkan hilang. Hal ini terjadi karena intervensi disertai dengan intimidasi oleh pihak kolonial membuat aturan-aturan dan sistem adat mengalami perubahan (Vergouwen, 2004).

Melemahnya peran dan kedudukan *Raja Huta* dalam sistem kepemimpinan dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh dan intervensi penjajahan Belanda. Intervensi itu adalah untuk mengambil alih keputusan dan kebijakan-kebijakan yang penting di masyarakat, yang sebelumnya diputuskan raja Huta sebagai kepala adat. Akibatnya, sistem pemerintahan oleh Kepala Desa yang dijalankan hari ini merupakan pengaruh dari warisan kolonial. *Raja Huta* hanya memiliki otoritas dalam urusan adat dan tidak ada fungsinya di masyarakat. Dalam hal ini negara melakukan “kolonisasi” terhadap budaya dan kearifan lokal, sehingga semua keputusan dibuat berdasarkan aturan dan sistem yang dibuat oleh negara.

Prinsip demokrasi yang diterapkan negara yaitu siapa pun boleh dipilih dan memilih untuk menjalankan pemerintahan desa, berbenturan dengan hukum sosial dalam adat yang terkandung dalam *Dalihan Na Tolu*. Mengedepankan persatuan dengan menjalankan prinsip-

prinsip *Dalihan Na Tolu*, tercermin dalam istilah “*Hasadaon*” yang artinya kesatuan. Istilah ini dalam bahasa lengkapnya adalah *Hita do na uju i, hita do saonari, hita do haduan*. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka memiliki arti, bahwa dahulu kita, sekarang juga kita demikian ke depan adalah kita juga. Maksud istilah ini mau mengatakan supaya menjaga serta mengutamakan persatuan dan kesatuan karena semuanya untuk kepentingan bahkan kebaikan bersama.

Kesimpulan

Kolonialisme dalam pengalaman masyarakat Kecamatan Parlilitan menjadi masalah serta gangguan sosial karena kehadiran kaum penjajah bertujuan untuk mengeksplorasi masyarakat dan hal itu adalah kejahatan kemanusiaan. Oleh karena situasi yang demikian inilah membuat masyarakat berusaha untuk mempertahankan hidup serta resisten terhadap penjajahan. Menghindari penjajah sebagai bentuk perlawanannya karena ketidakmampuan untuk melawan secara fisik. Perlawanannya non-fisik yang dilakukan seperti bersembunyi ke hutan-hutan dan oleh sebagian kelompok masyarakat bermigrasi atau merantau ke daerah yang aman dari kolonialisme. Perlakuan pihak kolonial kepada penduduk mencerminkan sikap orientalis yang cenderung melihat masyarakat sebagai yang lemah, mudah dieksplorasi serta lamban dan susah berkembang. Tindakan-tindakan yang diperlakukan kepada penduduk, seperti kerja paksa (*rodi*), mengintimidasi bahkan membakar pondok-pondok penduduk di area persawahan. Selain itu, kolonialisme menekan dan mengancam para warga apabila berani melawan perintah dan kemauan pihak penjajah. Pengalaman masyarakat berhadapan langsung dengan kolonial, mengakibatkan perubahan sosial-budaya dan interaksi sosial dalam masyarakat. Suasana aman dan tenang dalam *Huta* kini berubah menjadi suasana takut dan berada dalam ancaman. Masyarakat menghadapi pihak kolonial yang lebih kuat, perawakan yang lebih besar dan sama sekali sebagai sosok manusia yang berbeda dengan penduduk. Perubahan sosial pun terjadi seperti cara bekerja yang dahulunya santai dan bersifat kolektif, menjadi harus cepat dengan sistem harus selesai sesuai dengan yang telah ditargetkan. Kebiasaan masyarakat dengan hidup mengandalkan pertanian secara tradisional terganggu karena kaum laki-laki dewasa harus bekerja *rodi* di bawah pengawasan kolonial. Hal ini membuat masyarakat harus beradaptasi dengan situasi yang ada, serta bekerja menyesuaikan ritme dan cara kerja kolonial. Situasi ini memang membawa dampak dua sisi. Sisi pertama sebagai hal yang negatif, karena masyarakat hidup dalam ketakutan dan dalam tekanan. Suasana intimidatif membawa ketidaknyamanan dan ancaman keseharian bagi penduduk. Tetapi di sisi yang lain, perubahan cara kerja dan sistem kerja yang dipaksakan pihak kolonial membawa perubahan yang progresif bagi masyarakat serta mengenal peradaban yang lain di kemudian hari. Selain itu, *Huta* (perkampungan) yang terisolir berubah menjadi memiliki akses ke daerah Barus dan Dolok Sanggul. Saat itu, situasi ini memang sesuatu kemajuan dalam cara pandang orientalis dan bukan bagi penduduk. Akan tetapi dampaknya baru dapat dipahami dan lebih dirasakan pada kemudian hari. Dampaknya itu seperti aktivitas distribusi dan pertukaran hasil pertanian dan hasil hutan ke daerah Barus dan Dolok Sanggul dapat dilakukan lebih mudah di banding sebelum kedatangan kaum Kolonial karena adanya pembuatan jalan. Dampak lainnya adalah otoritas dan wibawa *Raja Huta* menjadi hilang pada saat itu, sehingga tatanan adat dan masyarakat menjadi terganggu. Hal lain yang berubah adalah sampai saat ini dalam hal kepemimpinan, otoritas dan fungsi *Raja Huta* mengalami perubahan. *Raja Huta* memimpin dalam hal adat istiadat, sementara sistem pemerintahan diberlakukan dari aturan negara dipimpin oleh Kepala Desa.

Daftar Rujukan

- Abdurahman, D. (2007). *Metode Penelitian Sejarah*. Ar-Ruzz Media.
- Adi, R. B., & Triwardani, R. (2025). Colonial Shadows and Legal Formalism : a Postcolonial Sociological Critique of Bureaucracy in Indonesia. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 14(3), 410–435. <https://doi.org/10.20961/jas.v14i3.102350>.
- Aritonang, J. S. (1988). *Sejarah Pendidikan Kristen di Tanah Batak*. BPK Gunung Mulia.
- Azhari, I., Tanjung, Y., Amalia, D. S., Nduru, D., Manalu, J., Hadizah, N., Indonesia, S. U., Toba, M. B., Regency, T., Province, N. S., & Community, T. B. (2024). Perubahan Sosial Masyarakat Batak Toba di Laguboti Tapanuli Utara Tahun 1913-1940. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4), 14808–14815. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.35987>.
- Bangun, P. P. (1988). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera Utara*. Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Castles, L. (2001). *Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatra: Tapanuli 1915–1940*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Daniel Perret. (2010). *Kolonialisme Kolonialisme dan Etnisitas:Batak dan Melayu di Sumatra Timur Laut*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Eva, L., & Pandiangan, R. A. (2019). Migrasi Batak ke Tanah Alas di Kabupaten Aceh Tenggara (1904-1920). *Putri Hijau*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.24114/ph.v4i1.13890>
- Febriani, R., & Nurberlian. (2024). Legacy of Colonialism and Indigenous Religious Resilience : A Study of Marapu Belief in East Nusa Tenggara. *Digital Press Social Sciences and Humanities*, 11(12), 1–8. <https://doi.org/10.29037/digitalpress.411464>.
- Gultom, I. (2010). *Agama Malim di Tanah Batak*. Bumi Aksara.
- Habeahan, M. A. G. K., Simanjuntak, R. F., & Marta, R. F. (2020). Melampaui Kedirian Identitas Batak Melalui Ritual dan Sejarah Masyarakatnya Atas Inspirasi Levinas. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 6(2), 174–189. <https://doi.org/10.31289/simbolika.v6i2.4135>.
- Harahap, S. H., Perangin-angin, D. R. B., Purba, J. I. S., Sembiring, S. H. B., & Zalukhu, D., . (2025). Language and Colonialism: A Historical Study on the Development of Dutch Loanwords in Indonesian. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 6(1), 29–35. <https://doi.org/10.34007/warisan.v6i1.2665>.
- Harianja, R. F., & Sudrajat, A. (2021). The local wisdom of Batak Toba through the philosophy of Dalihan Na Tolu in a kinship environment. *Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal*, 4(2), 759-765. <https://doi.org/10.33258/birle.v4i2.1838>.
- Hirosue, M. (1994). The Batak Millenarian Response to the Colonial Order. *Journal of Southeast Asian Studies*, 5(2), 331–343. <https://doi.org/10.1017/S0022463400013539>
- Koentjaraningrat. (1982). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia.
- Kozok, U. (2010). *Utusan Damai di Kemelut Perang: Peran Zending dalam Perang Toba*.

Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Matondang, H. M. V. (1995). *Percakapan dengan Dr. T.B. Simatupang*. BPK Gunung Mulia.
- Natalia, S. F., & Aditya, M. F. (2019). Dampak Perang Batak pada Tahun 1878–1907 Terhadap Penyebaran Agama Kristen di Sumatera Utara. *Tsaqofah: Jurnal Agama Dan Budaya*, 17(1), 42–48. <https://doi.org/10.32678/tsaqofah.v17i1.3171>.
- Operario, D., & Friske, S. T. (1999). *Integrating Social Identity and Social Cognition: A framework for Bridging Diverse Perspectives*. Blackwell.
- Pedersen, B. P. (1975). *Darah Batak dan Jiwa Protestan: Perkembangan Gereja-Gereja Batak di Sumatera Utara*. BPK Gunung Mulia.
- Perry, M. (2013). *Peradaban Barat: Dari Revolusi Perancis Hingga Zaman Global*. Kreasi Wacana.
- Prameswari, A., Febrianto, F., Pamungkas, K. D., Jonathan, H., Rojabiyah, H., & Perdana, Y. (2024). Menggali Sejarah Lokal: Eksplorasi Jejak Kolonialisasi Trimurjo Lampung Tengah, 1935-1942. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 8(3), 442–463. <https://doi.org/10.29408/fhs.v8i3.26839>.
- Robintang Helena Situmorang. (2013). *Perlawan Rakyat terhadap Pelaksanaan Kerja Rodi di Tapanuli 1930-1939*. Universitas Negeri Medan.
- Said, E. E. (2016). *Orientalisme: Menggugat Hegemoni Barat dan Mendudukkan Timur sebagai Subjek*. Pustaka Pelajar.
- Said, E. W. (1995). *Kebudayaan dan Kekuasaan: Membongkar Mitos Hegemoni Barat*. Bandung: Mizan, 1995. Mizan.
- Schumann, O. (2017). *Kekristenan di Asia Tenggara*. BPK Gunung Mulia.
- Setyoko, H., & Nugroho, A. (2025). Colonial Legacy and Industrialization: Historical Determinants in the Formation of Local Government Institutions. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 5(5), 1260-1268. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/JMS/article/view/7092>.
- Sibagariang, J. (2018). *Kerja Paksa di Batu Lubang pada Masa Penjajahan Belanda di Kabupaten Tapanuli Tengah (1930-1942)*. Skripsi. Universitas Negeri Medan.
- Sidjabat, W. B. (1982). *Ahu Si Singamangaraja: arti historis, politis, ekonomis, dan religius Si Singamangaraja XII*. Sinar Harapan
- Simanjuntak, B. A. (2006). *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945*. Yayasan Obor.
- Siregar, E., & Sormin, S. A. (2021). Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Batak Angkola di Kerajaan Luat Marancar pada Masa Pendudukan Belanda dan Jepang (1930-1942). *Jurnal Education and Development*, 9(3), 505–511. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i3.2456>.
- Soejanto. (1991). Sejarah Perlawan terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Sumatera Utara. CV. Tumaritis.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suwignyo, A. (2021). A Vast Expansion, Yet a Sorry Infrastructure: A Paradox of the

Decolonization of Indonesian Education, c. 1950s. *Lembaran Sejarah*, 17(1), 48-75.
<https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.69968>.

Tamba, H. K., Haloho, H. D., & Diansyah, A. (2022). Kondisi Kehidupan Masyarakat di Tanah Batak Setelah Masuknya Belanda. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 444-453. <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i2.5154>.

Tanjung, I. L. (2024). Modernity of the Batakinese in Tapanuli during the Dutch Colonial and Japanese Occupation Period. *Paramita: Historical Studies Journal*, 34(1), 79-89.
<https://doi.org/10.15294/paramita.v34i1.45799>.

Usman, H., & Akbar, P. S. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara.

Vergouwen, J. C. (2004). *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. LKiS.